

## ANALISIS PERAN ORGANISASI DAN INSTITUSI PEDESAAN DALAM OPTIMALISASI SUMBERDAYA PEDESAAN PADA KECAMATAN JOMBANG

Andien Yusnia Endah Pramudita<sup>1</sup>, Putri Pertama<sup>2</sup>, Afida Sapta Kirana<sup>3</sup>; Nico Dwi  
Habiburrahman<sup>4</sup>; Irama Aarafat<sup>5</sup>  
Universitas PGRI Jombang<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email : [andienyusnia@gmail.com](mailto:andienyusnia@gmail.com)<sup>1</sup>, [tritmaa@gmail.com](mailto:tritmaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [afidakirana816@gmail.com](mailto:afidakirana816@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nicodwi292@gmail.com](mailto:nicodwi292@gmail.com)<sup>4</sup>, [iramaarafat37@gmail.com](mailto:iramaarafat37@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**Abstract:** The optimization of the role of rural organizations and institutions is a key factor in enhancing the community's capacity to manage resources, strengthening citizen participation in village development, and promoting transparency and accountability in local resource management. Moreover, the synergy between the village government, the community, and other related stakeholders serves as an essential foundation for sustainable village development. This study aims to describe and analyze the strategic role of rural organizations and institutions in optimizing resources in Jombang District, with the hope of providing constructive recommendations for improving village performance and empowerment in the future. The research methodology includes direct interviews with various relevant parties, including village organization administrators, village officials, and local communities. The results of the study indicate that rural organizations and institutions in Jombang District are still underdeveloped, leading to suboptimal resource management and community welfare. These findings emphasize the need for efforts to enhance the capacity of village organizations and institutions through training, mentoring, and strengthening collaboration among stakeholders to promote community empowerment and more effective village development.

**Key Word:** Organizations, Institutions, Resource Optimization, Community/Village Empowerment, and Community Participation

**Abstrak:** Optimalisasi peran organisasi dan institusi pedesaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya, memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Selain itu, sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi landasan penting bagi terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran strategis organisasi dan institusi pedesaan dalam mengoptimalkan sumber daya di Kecamatan Jombang, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kinerja dan pemberdayaan desa di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengurus organisasi desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi dan institusi pedesaan di Kecamatan Jombang masih kurang berkembang, sehingga pengelolaan sumber daya dan tingkat kesejahteraan masyarakat belum optimal. Temuan ini menegaskan perlunya upaya peningkatan kapasitas organisasi dan institusi desa melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder guna mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Organisasi, Institusi, Optimalisasi sumber daya, Pemberdayaan masyarakat/desa, Partisipasi masyarakat

---

Date of Submission : 13 Mei 2025

Date of Acceptance : 16 Mei 2025

Date of Publish : 30 Mei 2025

## **Pendahuluan**

Kecamatan Jombang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Jombang yang memiliki potensi sumber daya pedesaan yang cukup besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Adolph, 2016). Pengelolaan sumber daya yang optimal menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, peran organisasi dan institusi pedesaan seperti lembaga desa, koperasi, kelompok tani, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting sebagai motor penggerak dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Organisasi dan institusi pedesaan di Kecamatan Jombang memiliki tugas strategis yang meliputi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta koordinasi pembangunan kawasan pedesaan (Puncak Joyontono, 1967). Fungsi-fungsi ini dijalankan untuk memastikan bahwa sumber daya desa dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Adolph, 2016). Selain itu, keberadaan BUMDes di setiap desa di Kabupaten Jombang, termasuk Kecamatan Jombang, telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha desa yang mandiri dan berdaya saing<sup>4</sup>.

Optimalisasi peran organisasi dan institusi pedesaan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya, tetapi juga memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Qomariyah, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap peran organisasi dan institusi pedesaan di Kecamatan Jombang menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi mereka dalam optimalisasi sumber daya pedesaan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Wahyudi, 2023).

Laporan hasil observasi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran strategis organisasi dan institusi pedesaan dalam mengoptimalkan sumber daya di Kecamatan Jombang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja dan pemberdayaan desa ke depan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya pedesaan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jombang.

## **Metode Penelitian**

Metode wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam secara langsung dari narasumber yang terkait dengan topik observasi (Siti Romdona, Silvia Senja Junista, 2025). Dalam laporan ini, wawancara digunakan untuk menggali dan menganalisis peran strategis organisasi serta institusi pedesaan dalam mengoptimalkan sumber daya di Kecamatan Jombang.

### **1. Pendekatan dan Desain Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yaitu peneliti telah menyusun pedoman wawancara sebagai panduan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas agar data yang

diperoleh mencakup aspek-aspek penting serta informasi tambahan yang mungkin tidak terduga sebelumnya.

## 2. Kriteria dan Pemilihan Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing pihak dalam pengelolaan sumber daya desa. Narasumber yang dijadikan objek wawancara meliputi:

- 1) Pejabat Pemerintah Desa: Sebagai pengambil keputusan dan fasilitator kebijakan.
- 2) Pengurus Organisasi Pedesaan: Seperti koperasi, kelompok tani, dan lembaga masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sumber daya.
- 3) Tokoh Masyarakat dan Praktisi Lapangan: Yang memiliki pengalaman langsung terkait implementasi program optimalisasi sumber daya.

Kriteria pemilihan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan aktif dalam pengelolaan, pengetahuan mendalam mengenai kondisi lokal, serta kemampuan memberikan gambaran komprehensif terkait upaya dan tantangan yang dihadapi.

## 3. Prosedur Wawancara

Prosedur pelaksanaan wawancara meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

### 1) Persiapan

Menyusun pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan utama dan pertanyaan pendukung berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga melakukan penjadwalan serta pemberitahuan awal kepada narasumber agar mereka siap memberikan informasi yang dibutuhkan.

### 2) Pelaksanaan

Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi yang nyaman bagi narasumber. Proses ini direkam (dengan izin dari narasumber) dan dicatat secara rinci untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Pendekatan interaktif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban dan memperdalam setiap topik sesuai alur diskusi.

### 3) Dokumentasi dan Transkripsi

Seluruh hasil wawancara dicatat dalam bentuk rekaman audio dan dokumen tertulis, yang kemudian di transkrip secara menyeluruh sebagai bahan analisis selanjutnya.

### 4) Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi pola, ide pokok, dan informasi penting yang berkaitan dengan peran strategis organisasi dan institusi pedesaan, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan sumber daya.

## 4. Keunggulan dan Pertimbangan Metode Wawancara

### 1) Kedalaman Informasi

Wawancara memberikan data yang mendalam dan kontekstual, sehingga mampu mengungkap dinamika yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya.

### 2) Fleksibilitas

Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan penyesuaian pertanyaan berdasarkan respons narasumber, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan relevan.

### 3) Verifikasi Data

Melalui dialog langsung, peneliti dapat mengklarifikasi informasi yang ambigu dan memastikan keakuratan data dengan cara melakukan cross-check antara narasumber yang berbeda.

Dengan penerapan metode wawancara yang sistematis dan terstruktur, observasi ini diharapkan mampu mengungkap secara mendalam peran strategis organisasi dan institusi pedesaan dalam optimalisasi sumber daya di Kecamatan Jombang. Hasil analisis dari wawancara ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kinerja dan pemberdayaan desa ke depan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Secara umum, hasil penelitian di keempat desa tersebut memperlihatkan pola yang sama: organisasi dan institusi pedesaan memang telah terbentuk dan menjalankan beberapa program, namun peran strategis mereka dalam optimalisasi sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat terbatas. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, tidak adanya pendampingan usaha, lemahnya kolaborasi antar-organisasi dan perangkat desa, serta keterbatasan akses permodalan dan jaringan pemasaran.

#### **a. Desa Plosogeneng**

Desa Plosogeneng merupakan salah satu desa di Kecamatan Jombang yang memiliki sejumlah organisasi pedesaan aktif, yakni Kelompok Tani, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), khususnya di bidang pengolahan makanan ringan seperti keripik usus. Organisasi-organisasi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya desa, namun secara umum peran mereka belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok Tani di Desa Plosogeneng merupakan organisasi yang paling dominan karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antar petani dalam kegiatan pertanian. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa Kelompok Tani lebih banyak berperan sebagai penyedia pekerjaan bagi anggotanya tanpa pengelolaan hasil yang optimal. Hasil pertanian yang diperoleh oleh anggota kelompok lebih banyak langsung dijual kepada pemasok atau tengkulak tanpa melalui proses pengolahan atau pemasaran yang dikelola secara kolektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tidak berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa yang seharusnya menjadi lembaga pengelola hasil produksi secara bersama. BUMDes di Desa Plosogeneng tidak memiliki pengelola aktif dan tidak menjalankan fungsi usahanya secara efektif. Akibatnya, potensi nilai tambah dari hasil pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

PKK di Desa Plosogeneng juga aktif dalam mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi anggotanya. Pelatihan yang diselenggarakan meliputi berbagai bidang seperti kerajinan tangan, menjahit, dan pengelolaan usaha mikro. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 80% peserta pelatihan adalah kader internal

PKK, sedangkan hanya 20% peserta berasal dari masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan pelatihan kurang memberikan dampak luas bagi masyarakat desa dalam membuka peluang usaha baru maupun meningkatkan keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Selain itu, pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak pelatihan yang bersifat satu kali atau sporadis tanpa adanya tindak lanjut berupa pendampingan usaha atau pengembangan jaringan pemasaran. Hal ini menyebabkan hasil pelatihan kurang dapat diimplementasikan secara optimal dalam bentuk usaha produktif yang berkelanjutan.

Organisasi NU di Desa Plosogeneng beroperasi secara internal dan lebih banyak melibatkan anggotanya dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat umum dalam kegiatan NU sangat terbatas, sehingga peran NU dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa belum optimal. NU memiliki potensi besar sebagai organisasi sosial keagamaan yang dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat jika mampu membuka diri dan berkolaborasi dengan organisasi lain serta pemerintah desa.

Salah satu aspek positif yang ditemukan di Desa Plosogeneng adalah adanya pendanaan dari program 'Desa Berdaya' yang bersumber dari UMKM warga desa, khususnya empat kelompok UMKM yang bergerak dalam produksi keripik usus. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan usaha-usaha mikro tersebut ke dalam satu tempat produksi bersama agar dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar.

Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan biaya operasional. Dana yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik tempat produksi dan pengadaan alat-alat produksi, sehingga biaya operasional sehari-hari seperti bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran menjadi terbatas. Akibatnya, kegiatan produksi bersama belum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga potensi sinergi dan efisiensi yang diharapkan belum terwujud.

Selain itu, desa juga menyediakan ruko yang diperuntukkan bagi warga yang ingin membuka usaha berjualan. Sistem penyewaan ruko ini memberikan peluang bagi warga untuk berusaha mandiri sekaligus memberikan pemasukan bagi desa melalui pendapatan sewa. Meskipun demikian, skala usaha yang berjalan masih bersifat kecil dan belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa secara menyeluruh. Pengelolaan ruko masih perlu ditingkatkan agar lebih profesional dan menarik lebih banyak penyewa. Promosi yang lebih intensif dan diversifikasi jenis usaha yang dapat menempati ruko juga menjadi aspek penting untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas ini.

#### **b. Desa Banjardowo**

Di Desa Banjardowo, terdapat dua organisasi pedesaan yang aktif berperan dalam pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat, yaitu Kelompok Tani dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Kelompok Tani secara rutin menerima sosialisasi dan pelatihan terkait teknik pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tani. Materi sosialisasi yang diberikan meliputi cara mengusir hama secara efektif dan pemahaman tentang jenis-jenis tanah yang ada di wilayah desa, sehingga petani dapat menyesuaikan pola tanam dengan karakteristik lahan. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh pihak luar yang berkompeten dan didukung oleh pemerintah desa maupun kecamatan.

Sementara itu, PKK aktif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan yang beragam, seperti pelatihan membuat buket bunga, pelatihan menjahit, dan

pelatihan tata cara rias atau make up. Pelatihan-pelatihan ini sebagian besar difasilitasi oleh ibu lurah yang memiliki keahlian khusus, dengan menghadirkan pemateri dari dalam desa maupun dari luar desa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga, khususnya perempuan, agar dapat membuka usaha mandiri atau meningkatkan pendapatan keluarga.

Namun, hasil observasi menunjukkan adanya kendala signifikan dalam keberlanjutan pelatihan-pelatihan tersebut. Meskipun warga mendapatkan keterampilan baru, sebagian besar tidak melanjutkan kegiatan secara kolektif atau berkelanjutan. Sifat individualisme warga menjadi hambatan utama, sehingga pelatihan lebih banyak dimanfaatkan secara pribadi tanpa membentuk kelompok usaha atau unit bisnis yang dapat meningkatkan skala ekonomi desa. Meski demikian, ada sebagian warga yang membuka praktik jahit secara individu, menandakan adanya potensi yang belum tergarap secara optimal.

Selain itu, pernah ada program bantuan budidaya ikan yang diberikan kepada warga desa sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan. Program ini mengalami kegagalan karena tidak adanya pengelola yang konsisten mengelola budidaya dalam jangka panjang. Program hanya bertahan selama dua kali masa panen sebelum akhirnya berhenti. Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk budidaya ikan, sehingga menghambat pengembangan usaha tersebut.

### **c. Desa Pandan Wangi**

Desa Pandan Wangi memiliki memiliki banyak struktur organisasi yang beberapa diantaranya sudah tidak aktif dan *vacum*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai. Untuk koperasi yang ada sudah tidak aktif karena kurangnya anggota yang mengikuti organisasi tersebut. Organisasi yang saat ini aktif hanya PKK, Posyandu dan Kelompok Tani. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan rutin sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan anggaran yang telah disesuaikan. Program PKK aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelatihan batik yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Potensi sumber daya UMKM yang tersedia ada produksi tempe, keripik, dan produksi tahu. Usaha UMKM ini dijalankan oleh masyarakat, dan dijual melalui distributor. Pada saat ini desa sudah memberikan pelatihan pelatihan untuk memajukan SDM setempat seperti pelatihan pembuatan Sirup salak, pelatihan pembuatan olahan tempe, dan membuat pupuk dari bekas cucian kedelai, pelatihan MC dan Birama.

Pada kelompok tani juga masih aktif dan memiliki kegiatan produktif. Poktan ada disetiap dusun, sedangkan untuk Gapoktan terdiri dari dusun” tani. Para petani aktif mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai bibit, obat, pupuk dan cara penanggulangan hama sesuai dengan musim panennya. Sedangkan untuk sumber daya manusianya masih membutuhkan pelatihan dan penyuluhan kembali untuk memaksimalan kegiatan para petani, dan organisasi lain. Untuk kegiatan penyuluhan bagi Pleno PKK, Karang Taruna dan kelompok tani sering mengundang pemateri dari luar agar materi yang diberikan bermutu dan maksimal.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan seringkali terhalang oleh waktu dan kesibukan masyarakat setempat. Saat ini ada harapan untuk memperbaiki program, perbaikan dan pengelolaan sumber daya yang maksimal. Harapan terus ada untuk mengembangkan potensi setempat diiringi dengan berkembangnya sumber daya manusia setempat. Karena banyak masyarakat yang kurang memahami organisasi,

dan potensi yang ada di desa setempat. Pemberdayaan masyarakat sudah dirancang dalam program setiap tahunnya, namun masyarakat belum bisa sepenuhnya melakukan program yang ada dengan maksimal

#### **d. Desa Plandi**

Desa Plandi merupakan salah satu desa yang memiliki struktur organisasi masyarakat yang cukup aktif dan berperan penting dalam pembangunan sosial. Kegiatan rutin PKK, terutama pelaksanaan posyandu di tujuh titik yang ditujukan ke balita dan ibu hamil, menunjukkan tingginya partisipasi ibu-ibu dalam menjaga kesehatan keluarga. Karang Taruna juga berkontribusi dalam pengembangan potensi remaja melalui kegiatan olahraga seperti sepak bola untuk laki-laki, serta voli dan senam untuk perempuan. Sementara itu, kelompok tani (Poktan) aktif dalam mengelola potensi sumber daya alam melalui pertanian padi dan kacang, serta peternakan sapi dan ikan, bahkan telah memanfaatkan kotoran ternak untuk pembuatan pupuk kompos organik. Selain itu, penyuluhan terkait pengendalian hama dan penggunaan obat-obatan di sektor pertanian turut dilakukan. Dari sisi ekonomi, keberadaan BUMDes dan pasar kuliner membuka peluang bagi pengembangan UMKM desa. Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti belum tersedianya pelatihan untuk ibu-ibu PKK dan perlunya dukungan pihak ketiga dalam pemberdayaan remaja perempuan. Rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi pendirian Koperasi Merah Putih, pembangunan infrastruktur seperti jalan paving dan sumur pompa, serta rencana pendirian perpustakaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, inovasi teknologi, khususnya dalam penyediaan alat pertanian, masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian dan peternakan.

Desa Plandi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui sinergi antar organisasi masyarakat dan program-program desa yang ada. Meski saat ini belum terdapat pelatihan khusus untuk ibu-ibu PKK, antusiasme mereka dalam kegiatan posyandu menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat tinggi untuk belajar dan berkembang jika diberikan fasilitas yang memadai. Pelibatan remaja melalui Karang Taruna dan posyandu remaja juga merupakan modal sosial yang baik untuk membangun generasi muda yang produktif dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Kegiatan pertanian dan peternakan yang dikelola oleh Poktan dapat ditingkatkan melalui kolaborasi dengan dinas pertanian atau lembaga pendidikan tinggi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pada teknologi baru, pelatihan, serta bantuan peralatan pertanian modern. Selain itu, pembangunan perpustakaan yang direncanakan dapat diarahkan tidak hanya sebagai pusat literasi umum, tetapi juga sebagai pusat informasi dan pelatihan, baik dalam bidang pertanian, kewirausahaan, maupun kesehatan keluarga. Secara keseluruhan, dengan penguatan kapasitas masyarakat dan dukungan inovasi teknologi yang berkelanjutan, Desa Plandi memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi desa mandiri dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

#### ***Pembahasan***

Temuan ini menegaskan perlunya upaya peningkatan kapasitas organisasi dan institusi desa melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder

guna mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih efektif. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pengurus organisasi desa. Pendampingan usaha harus dilakukan secara intensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pemasaran produk. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan desa yang sinergis dan berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi peran organisasi dan institusi pedesaan dapat benar-benar terwujud dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jombang.

### **1. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kapasitas SDM menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas organisasi desa. Banyak anggota organisasi maupun pengurus desa belum memiliki keterampilan manajerial, teknis, dan kewirausahaan yang memadai. Hal ini menyebabkan program-program yang dijalankan tidak berjalan optimal dan kurang inovatif.

Menurut penelitian di Desa Sukajaya, peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi kewirausahaan dan pelatihan teknis sangat diperlukan untuk memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan ekonomi desa (M. Harry Mulya Zein & Sisca Septiani, 2020). Selain itu, dalam buku *Pemberdayaan Ekonomi Desa* menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan kualitas SDM merupakan fondasi utama agar desa dapat mandiri secara ekonomi (Setyawan & Nugroho, 2020).

### **2. Minimnya Pelatihan yang Berkelanjutan**

Pelatihan yang diberikan selama ini masih bersifat insidental dan belum terstruktur secara berkelanjutan. Akibatnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak berkembang dan tidak mampu menjawab kebutuhan dinamis masyarakat desa.

Kementerian Desa PDTT (2021) menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang berkelanjutan dan terintegrasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang efektif (Setyawan & Nugroho, 2020). Studi di Desa Kertajaya juga menunjukkan bahwa pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan membuka peluang pasar baru bagi masyarakat (Arfianto & Balahmar, 2014)

### **3. Tidak Adanya Pendampingan Usaha**

Pendampingan usaha yang intensif dan berkelanjutan masih sangat kurang. Banyak pelaku usaha mikro dan kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bimbingan teknis dan manajerial yang memadai, sehingga sulit mengembangkan usahanya secara optimal.

Penelitian di Desa Jubung menegaskan bahwa pendampingan usaha merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM dan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Kartika Putri et al., 2024). Tanpa pendampingan, UMKM rentan menghadapi kegagalan karena keterbatasan modal, pemasaran, dan manajemen usaha.

### **4. Lemahnya Kolaborasi Antar-Organisasi dan Perangkat Desa**

Koordinasi dan kolaborasi antar organisasi desa dan perangkat desa masih lemah, sehingga program-program pemberdayaan berjalan sendiri-sendiri dan kurang sinergis. Lemahnya komunikasi ini menghambat optimalisasi sumber daya dan potensi desa.

Rahman dan Putri (2019) dalam kajiannya (Arfianto & Balahmar, 2014) menekankan bahwa penguatan jaringan komunikasi dan kolaborasi antar organisasi desa sangat penting untuk mempercepat pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat kapasitas organisasi dan memperluas dampak program pemberdayaan.

### **5. Keterbatasan Akses Permodalan dan Jaringan Pemasaran**

Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha desa. Selain itu, akses pasar yang terbatas membuat produk lokal sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini menghambat peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.

Menurut Susanti (2021) dalam (Kartika Putri et al., 2024) menegaskan bahwa akses permodalan dan jaringan pemasaran yang memadai merupakan faktor penentu keberhasilan UMKM dan pengembangan ekonomi desa. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memfasilitasi akses modal dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan peran strategis organisasi serta institusi pedesaan, diperlukan langkah-langkah berikut:

### **1. Pelatihan Terstruktur dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kompetensi Pengurus Organisasi Desa**

Pelatihan yang dilakukan selama ini di banyak desa masih bersifat sporadis dan belum terencana secara sistematis. Padahal, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pengurus organisasi desa, baik dalam aspek manajerial, teknis, maupun sosial. Pelatihan berkelanjutan memungkinkan pengurus untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa dan dinamika lingkungan eksternal.

Menurut Rozaki dkk. (2005) yang dikutip dalam penelitian oleh (Dhue & Tokan, 2021), penguatan kapasitas organisasi desa harus difokuskan pada pengembangan SDM secara individual dan organisasi melalui pelatihan dan bimbingan yang terprogram dan berkelanjutan. Penguatan ini menjadi esensial karena kapasitas organisasi desa merupakan basis otonomi desa dan fondasi utama dalam menjalankan fungsi regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, (Rizal et al., 2022) menegaskan bahwa pelatihan yang memanfaatkan teknologi digital (e-government) dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

### **2. Pendampingan Usaha yang Intensif dan Komprehensif**

Pendampingan usaha harus dilakukan secara intensif mulai dari tahap perencanaan, produksi, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran produk. Pendampingan ini berperan sebagai jembatan antara teori pelatihan dan praktik di lapangan, membantu pelaku usaha mengatasi kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi.

Penelitian di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pendampingan yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, terutama dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi desa (Rizal et al., 2022). Pendampingan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha agar sinergi tercipta dan hasilnya maksimal.

### **3. Penguatan Kolaborasi Antar-Stakeholder untuk Membangun Ekosistem Pemberdayaan Desa yang Sinergis**

Kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan desa yang sinergis dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang lebih luas sehingga program-program pemberdayaan dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

(Dhue & Tokan, 2021) mengungkapkan bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi desa harus diiringi dengan pengembangan mekanisme komunikasi dua arah dan koordinasi yang baik antar stakeholder.

Selain itu, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kontrol sosial juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga tercipta sinergi pelaksanaan program yang baik (LESTARI, 2022).

#### **4. Dampak Positif dari Optimalisasi Peran Organisasi dan Institusi Pedesaan**

Dengan pelatihan yang terstruktur, pendampingan usaha yang intensif, dan kolaborasi yang kuat antar stakeholder, organisasi dan institusi pedesaan dapat bertransformasi menjadi aktor strategis dalam pembangunan desa. Optimalisasi peran mereka akan berdampak nyata pada peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya desa, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jombang maupun daerah lain yang memiliki kondisi serupa.

### **Simpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa peran organisasi dan institusi pedesaan di Kecamatan Jombang, seperti kelompok tani, PKK, BUMDes, dan organisasi keagamaan, telah terbentuk dan menjalankan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Namun, secara umum, peran strategis mereka dalam optimalisasi sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, kurangnya pendampingan usaha, lemahnya kolaborasi antar-organisasi serta perangkat desa, dan keterbatasan akses permodalan serta jaringan pemasaran. Kondisi ini menyebabkan potensi sumber daya desa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program-program organisasi desa masih terbatas, sehingga dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan belum dirasakan secara merata. Temuan ini menekankan pentingnya upaya peningkatan kapasitas organisasi dan institusi desa melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Saran**

- a. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Organisasi:** Pemerintah desa bersama stakeholder terkait perlu menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lokal untuk meningkatkan kompetensi pengurus organisasi desa dan masyarakat. Materi pelatihan dapat mencakup manajemen organisasi, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital.
- b. **Pendampingan Usaha yang Intensif:** Pendampingan usaha harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pemasaran produk. Pemerintah desa dapat bermitra dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan LSM untuk menyediakan mentor atau pendamping yang berpengalaman.
- c. **Penguatan Kolaborasi Antar-Stakeholder:** Sinergi antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus terus diperkuat melalui forum komunikasi rutin, pembentukan tim kolaboratif, serta penyusunan

program bersama. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

- d. **Pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa:** BUMDes dan koperasi desa harus dioptimalkan sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperluas jaringan usaha serta pemasaran produk unggulan desa.
- e. **Fasilitasi Akses Permodalan dan Pemasaran:** Pemerintah desa dan stakeholder terkait perlu memfasilitasi akses permodalan, baik melalui kemitraan dengan lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pemasaran produk desa juga sangat penting.
- f. **Monitoring dan Evaluasi Program:** Setiap program pemberdayaan dan pengembangan organisasi desa perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan optimalisasi peran organisasi dan institusi pedesaan di Kecamatan Jombang dapat benar-benar terwujud dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### References

Adolph, R. (2016). *PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIVIDU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG*.

Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*.

Dhue, J. I. R., & Tokan, F. B. (2021). PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA OBEN KABUPATEN KUPANG.

Kartika Putri, D. A., Fatiya Diana, W. P., & Rahay, R. (2024). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Jubung Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

LESTARI, A. T. (2022). PENINGKATAN KAPASITAS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Desa Golo Manting Kec. Sano Nggoang Kab. Manggarai Barat).

M. Harry Mulya Zein, & Sisca Septiani. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan: Analisis dan Solusi.

Puncak Joyontono, D. (1967). *PERATURAN BUPATI JOMBANG*.

Qomariyah, U. N. (2021). PESONA MADE DAN POTENSI ALAMNYA (Pemberdayaan Masyarakat Desa Made Kecamatan Kudu Melalui Pemanfaatan SDA).

Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government).

Setyawan, D., & Nugroho, D. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA. In R. Ummah (Ed.), *Proceedings of the National Academy of Sciences* (1st ed.). Saiwawai Publishing.

Siti Romdona, Silvia Senja Junista, A. G. (2025). Teknik Pengumpulan Data. *JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK*, 3(1), 39–47.

Wahyudi, M. A. T. (2023). Upaya Peningkatan Perilaku Organisasi Pada Organisasi Kepemudaan Desa Sumberejo Plandaan Jombang.